

Sinergi untuk Pesisir: Analisis Tata Kelola Kolaboratif dan CBT di Lima Desa Wisata Belitung

Yunisti Pratiwi¹

¹ D4 Usaha Perjalanan Wisata, Politeknik Belitung, Belitung, Indonesia
email: yunistipratiwi@gmail.com

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright (c) 2025 Sadar
Wisata: Jurnal Pawirisata



Corresponding Author: Yunisti Pratiwi, Politeknik Belitung, Belitung, Indonesia
yunistipratiwi@gmail.com

Received Date: 1 December 2025

Revised Date: 7 December 2025

Accepted Date: 27 December 2025

Artikel Info

Keywords: Community-Based Tourism; Collaborative governance; Coastal Tourism; Belitung; Sustainability
Community-Based Tourism, Collaborative governance, Coastal tourism, Belitung, Sustainability

Abstrak

Collaborative governance, Coastal tourism, Belitung, Sustainability
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan model Community-Based Tourism (CBT) berbasis tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam mewujudkan pariwisata pesisir berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Kawasan ini memiliki posisi strategis sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dengan potensi alam, budaya, dan sosial-ekonomi yang tinggi, namun menghadapi tekanan ekologis serta tantangan tata kelola akibat intensitas investasi dan ketimpangan peran antaraktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada lima desa pesisir terpilih—Desa Batu Itam, Terong, Tanjung Binga, Keciput, dan Tanjung Tinggi—yang memiliki karakteristik dan potensi wisata berbeda. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 12.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Belitung memiliki prospek kuat apabila didukung oleh kolaborasi lintas-aktor yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Masing-masing desa menampilkan keunikan potensi: Batu Itam dengan warisan maritim dan situs kapal karam Sriwijaya; Terong dengan ekowisata kreatif berbasis pertanian dan budaya; Tanjung Binga dengan ekonomi bahari dan produk olahan laut; Keciput dengan wisata konservasi penyu; serta Tanjung Tinggi sebagai ikon wisata nasional. Tingkat partisipasi masyarakat bervariasi dari pasif hingga citizen control, dipengaruhi oleh kapasitas sosial, kelembagaan, dan struktur kepemilikan lahan. Kolaborasi yang berbasis kepercayaan, transparansi, dan kesetaraan menjadi kunci keberhasilan implementasi CBT di kawasan pesisir.
Penelitian ini menawarkan model collaborative community-based governance sebagai kerangka penguatan pariwisata pesisir berkelanjutan. Strategi utama meliputi:
(1) peningkatan kapasitas SDM lokal; (2) penguatan kelembagaan komunitas; (3) pengembangan kolaborasi lintas-desanya dan lintas-sektor; serta (4) penguatan narasi dan branding destinasi berbasis identitas lokal. Secara teoretis, penelitian ini memperluas konsep CBT dengan menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif sebagai determinan keberlanjutan destinasi. Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah,

Kata kunci: Community-Based Tourism; Tata kelola kolaboratif; Pariwisata pesisir; Belitung; Keberlanjutan

komunitas, dan sektor swasta dalam membangun pariwisata pesisir yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Abstrak

This study aims to analyze the development of a Community-Based Tourism (CBT) model integrated with collaborative governance to achieve sustainable coastal tourism in Belitung Regency, Indonesia. The region holds strategic significance as a Special Economic Zone (SEZ) for tourism, endowed with rich natural, cultural, and socio-economic potential. However, it faces ecological pressures and governance challenges due to increasing investment intensity and unequal stakeholder participation. Employing a qualitative approach through a multiple case study design, this research focuses on five coastal villages—Batu Itam, Terong, Tanjung Binga, Keciput, and Tanjung Tinggi—each possessing distinctive tourism characteristics. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and document analysis, and were thematically analyzed using NVivo 12 software.

The findings reveal that community-based tourism in Belitung demonstrates strong potential when supported by effective cross-sector collaboration among local communities, government, and private actors. Each village highlights unique assets:

Batu Itam with maritime heritage and the Sriwijaya shipwreck site; Terong with creative agro-cultural ecotourism; Tanjung Binga with its marine economy and seafood processing; Keciput with turtle conservation tourism; and Tanjung Tinggi as a national tourism icon. The level of community participation ranges from passive to citizen control, influenced by social capacity, institutional strength, and land ownership structures. Trust-based, transparent, and equitable collaboration emerges as a key factor for successful CBT implementation in coastal areas.

This research proposes a collaborative community-based governance model as a framework for strengthening sustainable coastal tourism. The core strategies include: (1) enhancing local human resource capacity; (2) empowering community institutions; (3) fostering inter-village and cross-sector collaboration; and (4) developing destination branding based on local identity. Theoretically, this study extends the concept of CBT by highlighting collaborative governance as a crucial determinant of destination sustainability. Practically, it provides actionable recommendations for local governments, communities, and private sectors to develop inclusive, adaptive, and competitive coastal tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sumber utama perekonomian di banyak negara di dunia. Indonesia termasuk dalam sepuluh negara yang memanfaatkan wilayah pesisir secara signifikan, di mana sektor ini berkontribusi sekitar 60% dalam pelayanan jasa (Liu et al, 2021). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangat penting, baik untuk menjaga keberlanjutan ekosistem maupun mengoptimalkan strategi pengembangannya. Keindahan alam pesisir menjadi daya tarik utama bagi wisatawan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal (Tampubolon & Sauyai, 2024). Seiring dengan pertumbuhan daya tarik wisata pantai, masyarakat setempat juga memperoleh manfaat lain seperti peningkatan infrastruktur, pembukaan lapangan pekerjaan, dan kesempatan untuk memperkenalkan budaya lokal. Namun, pemanfaatan pariwisata pesisir yang berkelanjutan menuntut pengelolaan yang tepat terhadap ekosistem dan sumber daya alam, sehingga manfaat ekonomi dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan kawasan pesisir memang membuka peluang ekonomi, tetapi sering kali menimbulkan kerusakan ekosistem akibat tekanan aktivitas manusia (Anggara & Hardyanti, 2024) dan (Arisnawawi et al, 2025). Tantangan utama terletak pada menemukan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan perlindungan lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan degradasi ekosistem, penurunan

kualitas lingkungan, serta hilangnya nilai budaya lokal (Perdani et al, 2025). Tekanan yang dihadapi ekosistem pesisir meliputi kelebihan daya tampung wisatawan, pengikisan garis pantai, pencemaran, serta menurunnya kualitas terumbu karang, padang lamun, dan mangrove (Perdani et al, 2025). Selain itu, permasalahan tata kelola, seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal, sering menjadi penghambat keberhasilan pengelolaan kawasan wisata pesisir secara berkelanjutan (Akapip & Kissya, 2023).

Hal ini mempertegas pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan dan budaya (Nasution et al, 2024). Untuk itu, dibutuhkan strategi yang mampu meningkatkan daya saing destinasi pesisir dengan memperhatikan empat aspek utama: (1) infrastruktur ramah lingkungan, (2) peluang wisata yang beragam, (3) keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta (4) kualitas hidup masyarakat pesisir (Anggara, Taufik, Muharis, & Pribadi, 2024) dan (Saragih, 2024). Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan bagi Pesisir Kabupaten Belitung, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dan memiliki kekayaan alam pesisir bernilai strategis, baik dari aspek ekonomi maupun ekologis. Wilayah ini menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata bahari. Potensi tersebut bukan hanya menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal.

Penetapan pesisir Kabupaten Belitung sebagai KEK pariwisata berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem pesisir. Aktivitas pariwisata berbasis alam maupun buatan dapat memicu permasalahan baru apabila tidak dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya terkait integrasi antara pemanfaatan pesisir sebagai kawasan wisata dan pelestarian ekosistem itu sendiri (Tohopi et al, 2025). Selama ini, pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Belitung cenderung bertumpu pada daya tarik yang sudah ada, seperti pantai dan kegiatan bahari, dengan fokus pembangunan yang lebih mengutamakan infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Pola ini membuat pemanfaatan potensi kawasan wisata pesisir masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, penguatan lokalitas serta integrasi antara pemanfaatan pesisir dan pelestarian ekosistem menjadi kebutuhan mendesak.

Pernyataan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana mencegah dominasi investor swasta yang berorientasi keuntungan jangka pendek di wilayah KEK Belitung, serta bagaimana memastikan manfaat pariwisata dapat terdistribusi secara adil bagi masyarakat lokal, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem pesisir. Berdasarkan masalah ini, diperlukan model pengelolaan kawasan pesisir yang mampu menggabungkan pemanfaatan pariwisata dengan pelestarian lingkungan, berlandaskan prinsip keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan Community-Based Tourism (CBT) dengan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) menjadi relevan untuk menjawab tantangan ini. Penelitian ini akan mengkaji penerapan model tersebut di lima desa pesisir Kabupaten Belitung, antara lain Desa Batu Itam, Desa Wisata Kreatif Terong, Desa Tanjung Binga, Desa Keciput, dan Desa Tanjung Tinggi, yang masing-masing memiliki potensi dan karakteristik unik, mulai dari situs sejarah, basis desa wisata, pusat aktivitas nelayan, produk khas lokal, hingga pantai yang terkenal secara internasional.

Meskipun banyak penelitian telah membahas pariwisata berbasis komunitas (CBT) di Indonesia, studi yang secara spesifik menganalisis interaksi antara model CBT dengan dinamika tata kelola kolaboratif dalam konteks destinasi berstatus KEK, di mana tekanan investasi dan ekonomi sangat tinggi, masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat atau keberlanjutan lingkungan secara terpisah, belum pada sinerginya dalam model tata kelola yang inklusif dan adaptif terhadap tekanan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana integrasi antara prinsip CBT dan tata kelola kolaboratif dapat diimplementasikan dalam pengelolaan pariwisata pesisir berkelanjutan di Kabupaten Belitung. Fokusnya adalah menemukan pola kolaborasi ideal antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta yang mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bersifat ganda: secara konseptual, mengembangkan model tata kelola kolaboratif berbasis komunitas yang dapat menjadi rujukan pengelolaan kawasan pesisir; secara praktis, memberikan rekomendasi bagi Kabupaten Belitung maupun daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa, agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dijalankan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal maupun kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara

mendalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di lima desa pesisir terpilih di Kabupaten Belitung. Fokus penelitian diarahkan pada upaya mengidentifikasi dan menganalisis potensi alam, budaya, serta sosial-ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing desa, guna dikembangkan melalui model Pariwisata Berbasis Komunitas (Community-Based Tourism/CBT). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana partisipasi aktif masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan pariwisata, serta bagaimana tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan dapat diwujudkan untuk mendukung pengembangan pariwisata pesisir yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kabupaten Belitung.

TINJAUAN PUSTAKA

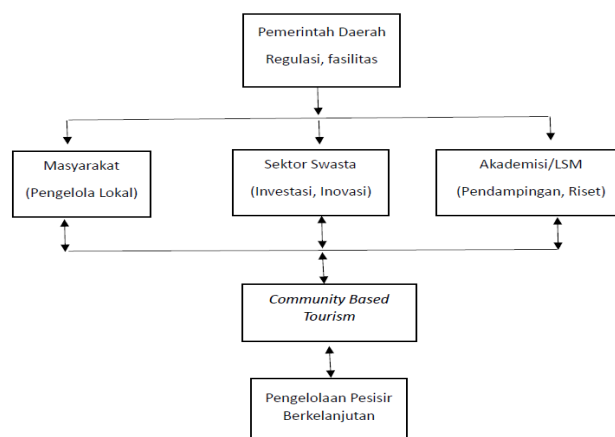
2.1. Pariwisata Berbasis Komunitas

Pariwisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism*) merupakan suatu pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pengelolaan destinasi (Murphy 1985) dan (Singgalen & Prasadja, 2025). Menurut Suryawan & Mahagangga (2024), konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, pemerataan distribusi manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Keberhasilan implementasi CBT tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau pertumbuhan pendapatan daerah, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan dan kelestarian sumber daya alam tetap terjaga (Irawati & Prasetyo, 2025).

Dalam konteks wilayah pesisir, CBT memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir (Khristianto & Oktawirani, 2025). Penerapan model ini di Kabupaten Belitung memungkinkan terwujudnya integrasi antara pengelolaan destinasi wisata dan penguatan kapasitas masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga penggerak utama pembangunan pariwisata (Murphy 1985).

2.2. Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan model pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan (Sudirman et al, 2022). Pendekatan ini menekankan adanya dialog, kepercayaan, dan pembagian peran yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengembangan CBT, tata kelola kolaboratif berfungsi memastikan bahwa seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan sinergi dalam pemanfaatan sumber daya dapat diperkuat.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengalaman penerapan tata kelola kolaboratif di berbagai daerah pesisir menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan efektivitas upaya konservasi, memperluas distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta menjaga keberlanjutan destinasi wisata dalam jangka panjang (Purnomo et al, 2024). Hal ini menjadi relevan bagi Kabupaten Belitung yang membutuhkan kerangka pengelolaan terintegrasi untuk memastikan kelestarian ekosistem pesisir sekaligus keberlanjutan ekonomi

pariwisata.

2.3. Sintesis Konseptual: Integrasi CBT dan Tata Kelola Kolaboratif

Konsep Community-Based Tourism (CBT) dan tata kelola kolaboratif saling melengkapi dalam membangun model pengelolaan pariwisata pesisir yang berkelanjutan. CBT menekankan pertanyaan “siapa yang menjadi pusat pembangunan,” yaitu masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata, sedangkan tata kelola kolaboratif menitikberatkan pada “bagaimana proses kolaborasi antarpihak dijalankan” untuk mencapai tujuan bersama, termasuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di Kabupaten Belitung, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, penerapan integrasi CBT dan tata kelola kolaboratif sangat relevan. Masyarakat lokal diberdayakan secara aktif dalam struktur tata kelola yang inklusif, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan, sektor swasta sebagai mitra investasi dan inovator produk wisata, serta akademisi dan LSM sebagai penyedia pengetahuan, pendampingan, dan evaluasi. Melalui sinergi antaraktor ini, diharapkan terbentuk model pengelolaan pariwisata pesisir berbasis potensi lokal, mendorong partisipasi aktif masyarakat, menjunjung prinsip konservasi lingkungan, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, sehingga pembangunan pariwisata pesisir Belitung menjadi inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

2.4. Mechanism Linking

Integrasi Community-Based Tourism (CBT) dan tata kelola kolaboratif dapat dipahami sebagai mekanisme berjenjang (*mechanism linking*) yang membentuk rantai keberlanjutan destinasi. Kualitas kolaborasi muncul dari fondasi kepercayaan (*trust*) yang dibangun antarpemangku kepentingan—masyarakat lokal, pemerintah desa maupun daerah, sektor swasta, serta lembaga pendamping seperti organisasi lingkungan dan institusi akademik. Kepercayaan ini menjadi pemicu awal yang mempengaruhi kualitas komunikasi, kesetaraan peran, dan transparansi dalam skema kerja sama. Ketika *trust* menguat, kualitas kolaborasi meningkat, yang kemudian menentukan efektivitas pemberdayaan dan penguatan kapasitas komunitas lokal. Konsep *tourism as a community approach* yang dikemukakan Murphy (1985) menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak cukup bertumpu pada atraksi dan infrastruktur, tetapi harus memiliki sistem yang memastikan komunitas menjadi subjek dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat (Murphy, 1985).



Gambar 2. (Jackson, 2025)

Dalam model ini, *trust* berperan sebagai *linking mechanism* yang memperkuat tata kelola kolaboratif, lalu mendorong pemberdayaan berbasis kontrol warga (*citizen control*) dan kepemilikan komunitas (*community ownership*). Berdayanya komunitas mempengaruhi keberlanjutan CBT melalui kemampuan adaptasi kelembagaan, profesionalisasi SDM lokal, inovasi produk wisata berbasis identitas desa, serta ketahanan terhadap tekanan eksternal, terutama di kawasan destinasi yang mengalami intensitas investasi tinggi seperti pesisir Belitung. Rantai mekanistik ini menunjukkan bahwa keberlanjutan CBT tidak hanya merupakan output program, tetapi merupakan hasil interaksi sistem sosial-kelembagaan yang saling terkait, di mana kualitas sinergi antaraktor menjadi determinan utama keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis desa wisata pesisir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada lima desa pesisir terpilih di Kabupaten Belitung, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam potensi, tantangan, serta peran masyarakat dalam pengembangan Community-Based Tourism (CBT) sekaligus merumuskan strategi pengelolaan wisata pesisir yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena dalam lingkungan alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, sehingga dapat menangkap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara kontekstual di setiap desa (Fadli, 2021). Desa-desa yang menjadi lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan potensi wisata dan karakteristik khususnya, yaitu Desa Batu Itam, Desa Wisata Terong, Desa Tanjung Binga, Desa Keciput,

dan Desa Tanjung Tinggi. Desa-desanya memiliki daya tarik wisata alam, budaya, dan aktivitas bahari yang unik, berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat pesisir, serta memiliki potensi kuat untuk penerapan konsep CBT, meskipun menghadapi tantangan nyata terkait pengelolaan pariwisata dan pelestarian lingkungan yang memerlukan pendekatan kolaboratif.

Pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling untuk menjaring narasumber yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan mendalam terkait pengelolaan wisata pesisir. Informan yang terlibat mencakup masyarakat lokal seperti nelayan, pelaku usaha wisata, pengrajin, dan anggota kelompok sadar wisata; aparat pemerintah desa serta dinas terkait; pelaku usaha swasta di sektor pariwisata; lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lingkungan; serta wisatawan yang dapat memberikan perspektif pengguna layanan wisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati aktivitas wisata, interaksi antara masyarakat dan wisatawan, serta kondisi lingkungan pesisir, dengan temuan dicatat dalam field notes dan dilengkapi dokumentasi foto maupun video. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi potensi, tantangan, partisipasi, dan aspirasi pengembangan CBT, khususnya terhadap informan kunci yang memiliki pengaruh dan pengetahuan luas. FGD melibatkan peserta dari berbagai pemangku kepentingan di setiap desa dengan tujuan memvalidasi temuan dari observasi dan wawancara, serta menyusun rekomendasi strategis secara kolektif. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen perencanaan desa, kebijakan daerah, laporan pengelolaan wisata, dan data sekunder lain yang relevan.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik kualitatif, dengan tahapan sistematis sebagai berikut: (1) transkripsi verbatim hasil wawancara, FGD, dan catatan observasi; (2) reduksi data melalui open coding untuk menandai segmen data dan membentuk nodes secara induktif; (3) axial coding untuk menyusun relasi atau hierarki antar node dan membangun kategori analitis utama, seperti potensi destinasi, tantangan pengembangan, peran komunitas, dan strategi pengelolaan, dengan contoh mekanisme hubungan berupa trust, kolaborasi, pemberdayaan, keberlanjutan CBT; (4) selective coding untuk menetapkan core theme sebagai jangkar narasi sekaligus merumuskan proposisi analitis temuan berdasarkan kutipan informan. Seluruh analisis dibantu dengan perangkat lunak NVivo 12 untuk mempermudah pengelolaan, sintesis, dan visualisasi data.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi metode (observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi), triangulasi sumber (konfirmasi temuan kepada aktor lintas pemangku kepentingan), dan member checking untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan persepsi informan. Selain itu, proses reduksi data dan analisis tematik dilakukan secara iteratif, sehingga setiap kategori analitis diverifikasi secara kontekstual dan konsisten dengan data lapangan.

Proses penelitian dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari persiapan yang mencakup studi pendahuluan, penyusunan instrumen penelitian seperti panduan wawancara dan FGD, serta proses perizinan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data lapangan melalui observasi partisipatif, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Tahap akhir meliputi analisis dan sintesis data, termasuk transkripsi, coding, validasi data, dan perumusan strategi pengembangan CBT berbasis temuan lapangan.

Kualitas partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan kerangka Ladder of Citizen Participation dari Arnstein (1969) yang memetakan peran warga dari manipulasi hingga citizen control, serta diperkuat dengan tipologi partisipasi kontekstual dari Pretty (1995) yang menekankan fleksibilitas partisipasi berbasis konteks kelembagaan desa. Analisis ini digunakan untuk menilai tingkat kendali dan inklusivitas peran masyarakat dalam keberlanjutan pengelolaan CBT, sehingga strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan secara kontekstual di masing-masing desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Informan

Informan penelitian terdiri dari 18–20 orang yang berperan langsung dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di lima desa pesisir (Tabel 1 dan Gambar 3). Informan meliputi kepala desa, kepala dusun, pengelola desa wisata, serta anggota masyarakat lokal. Pemilihan menggunakan purposive sampling, memastikan data relevan dan representatif untuk menganalisis pengelolaan desa wisata.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Jabatan/Peran	Jumlah	Metode Rekrutmen
1	Kepala Desa	5	Purposive Sampling
2	Kepala Dusun	5	Purposive Sampling
3	Pengelola Desa Wisata	5	Purposive Sampling
4	Masyarakat Lokal	5	Purposive Sampling
Total		20	

Sumber : Data Penelitian



Gambar 3: dokumentasi penelitian

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 3, proses pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan berbagai informan kunci yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan desa wisata. Informan terdiri dari kepala desa, kepala dusun, pengelola desa wisata, serta anggota masyarakat lokal. Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan desa wisata. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan representatif untuk menganalisis pengelolaan desa wisata, seperti yang ditampilkan pada Tabel 1 dan Gambar 3

4.2. Dialektika Potensi dan Realitas Pengembangan CBT di Pesisir Belitung

Kelima desa pesisir yang menjadi objek kajian Batu Itam, Wisata Kreatif Terong, Tanjung Binga, Keciput, dan Tanjung Tinggi menunjukkan karakteristik dan daya tarik yang beragam, mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan sosial-ekonomi khas pesisir Belitung.

Tabel 2. Dialektika Potensi dan Realitas Pengembangan CBT di Pesisir Belitung

Desa	Potensi Utama	Realitas / Tantangan	Narasi / Branding	Isu CBT & Strategi
Batu Itam	Situs kapal tenggelam era Sriwijaya, wisata edukatif dan heritage	Partisipasi masyarakat cukup aktif, perlu penguatan kapasitas	“Jejak Sriwijaya”	Mempertahankan heritage sambil meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kelola destinasi secara berkelanjutan
Wisata Kreatif Terong	Agrowisata, ekowisata berbasis kearifan lokal, pengelolaan mangrove HKM, homestay mandiri	Partisipasi masyarakat progresif, dukungan kelembagaan lokal sedang berkembang	“Kreativitas Pesisir”	Mendorong inovasi komunitas dan kolaborasi horizontal untuk pemberdayaan dan diversifikasi ekonomi lokal

Tanjung Binga	Ekonomi bahari, pengolahan ikan asin, wisata bawah laut	Partisipasi masyarakat rendah, mindset <i>daily income</i> , keterbatasan bahasa asing	“Bahari dan Kuliner Tradisional”	Strategi kolaboratif untuk mengatasi dominasi investor swasta, power asymmetry, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat
Keciput	Ekowisata bahari, konservasi penyu, madu hutan, tradisi adat Muang Jong	Partisipasi masyarakat relatif aktif, kapasitas SDM sedang	“Konservasi Penyu”	Memperkuat keterlibatan komunitas dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan wisata berbasis konservasi
Tanjung Tinggi	Destinasi nasional, potensi alam tinggi	Keterlibatan masyarakat rendah akibat dominasi lahan swasta	“Ikon Laskar Pelangi”	Meningkatkan akses partisipasi lokal dan keseimbangan kontrol antara masyarakat dan investor melalui strategi kolaboratif

Sumber: Hasil penelitian 2025

Setiap desa memiliki keunggulan yang, jika dikelola secara kolaboratif, dapat membentuk klaster pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Batu Itam memiliki nilai historis dan simbolik tinggi melalui situs kapal tenggelam era Sriwijaya yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya bawah air, serta tradisi penangkapan ikan Siro yang mendukung wisata edukatif berbasis sejarah maritim. Desa Wisata Kreatif Terong menonjol melalui integrasi pertanian, kuliner, dan kearifan lokal ke dalam agrowisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat, didukung oleh pengelolaan mangrove melalui HKM dan sistem homestay mandiri.

Di sisi lain, Desa Tanjung Binga menunjukkan potensi ekonomi bahari melimpah, seperti pengolahan ikan asin dan daya tarik wisata bawah laut, namun menghadapi kendala mindset harian (*daily income mindset*) dan keterbatasan kemampuan bahasa asing bagi pemandu wisata muda partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai inisiator dan evaluator (Junaid, 2020). Desa Keciput menonjol melalui ekowisata bahari, konservasi penyu, madu hutan, serta tradisi adat Muang Jong yang memperkuat identitas budaya dan nilai konservasi. Tanjung Tinggi, sebagai destinasi nasional, menghadapi paradoks: potensi alam sangat tinggi, namun keterlibatan masyarakat terbatas akibat dominasi kepemilikan lahan swasta (Hernandini et al., 2017) dan (Tohidi, 2020). Kondisi ini mencerminkan dialektika antara potensi dan realitas CBT, antara idealisme pemberdayaan masyarakat dan kendala struktural seperti akses pasar, infrastruktur, dan kapasitas SDM, sejalan dengan temuan Utama & Haryadi (2025) mengenai hambatan kelembagaan dan ketimpangan kontrol sumber daya di negara berkembang. Secara khusus Dialektika ini menunjukkan perbedaan antara potensi dan realitas CBT: idealisme pemberdayaan masyarakat versus kendala struktural, seperti akses pasar, kapasitas SDM, dan ketimpangan kontrol sumber daya (Utama & Haryadi, 2025).

4.3. Kualitas Partisipasi Masyarakat: Dari Keterlibatan Pasif Menuju Kepemilikan Aktif

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pendekatan Community-Based Tourism (Pretty, 1995). Berdasarkan observasi lapangan, partisipasi masyarakat di lima desa menunjukkan variasi signifikan. Desa Wisata Kreatif Terong menjadi contoh paling progresif, dengan pengembangan desa wisata yang diinisiasi secara bottom-up melalui diskusi warga, pemetaan potensi secara mandiri, dan pembiayaan kelompok. Model ini menggambarkan partisipasi pada tingkat *partnership* atau *citizen control*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga perencana dan pengambil keputusan, didukung oleh solidaritas sosial dan budaya gotong royong.

Desa Batu Itam dan Keciput menunjukkan partisipasi masyarakat berbasis kemitraan (*consultation-partnership*), melalui kolaborasi dengan UNESCO, perguruan tinggi, dan lembaga konservasi. Tokoh masyarakat berperan sebagai *knowledge broker* yang menjembatani komunitas lokal dengan aktor eksternal, memperkuat kapasitas sosial dan legitimasi pengelolaan wisata (Utomo et al., 2024). Sebaliknya, Desa Tanjung Binga dan Tanjung Tinggi masih berada pada tingkat partisipasi rendah, dengan masyarakat terbatas pada pengelolaan produk ekonomi dan homestay tanpa pengaruh strategis terhadap perencanaan pariwisata. Kondisi ini menegaskan pentingnya *capacity building* dan

mekanisme pembagian manfaat yang adil agar masyarakat dapat bertransformasi dari penerima dampak menjadi pemilik perubahan (Pretty, 1995).

Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pendekatan Community-Based Tourism (CBT) (Pretty, 1995) dan menunjukkan variasi yang berbeda di lima desa pesisir Belitung. Desa Wisata Kreatif Terong menonjol dengan partisipasi masyarakat yang aktif, berkembang secara bottom-up, dan mencapai tingkat citizen control, di mana warga berperan sebagai perencana dan pengambil keputusan. Desa Batu Itam dan Keciput menunjukkan partisipasi berbasis kemitraan, dengan tokoh masyarakat berfungsi sebagai knowledge broker yang menjembatani komunitas lokal dengan aktor eksternal, memperkuat kapasitas sosial dan legitimasi pengelolaan desa wisata. Sebaliknya, Desa Tanjung Binga dan Tanjung Tinggi masih berada pada tingkat partisipasi rendah, di mana masyarakat terbatas pada pengelolaan produk ekonomi seperti homestay atau usaha kecil tanpa pengaruh strategis terhadap perencanaan pariwisata. Kondisi ini menegaskan perlunya capacity building dan mekanisme distribusi manfaat yang adil agar masyarakat dapat bertransformasi dari penerima dampak menjadi pemilik perubahan dalam pengembangan CBT yang berkelanjutan.

4.4. Tata Kelola Kolaboratif sebagai Kunci Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Keberhasilan CBT tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga pada kualitas tata kelola kolaboratif antar aktor: pemerintah, swasta, komunitas, dan lembaga pendukung (Ishak & Hos, 2025). Desa Batu Itam memperlihatkan praktik kolaboratif kuat melalui kemitraan dengan UNESCO dan perguruan tinggi, yang memfasilitasi pelatihan, dokumentasi warisan bawah laut, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Desa Terong dan Keciput menampilkan kolaborasi horizontal berbasis komunitas, membangun jaringan sinergis antara kelompok tani, homestay, pengrajin, dan kelompok konservasi, meski tetap membutuhkan dukungan formal melalui regulasi desa dan forum komunikasi lintas kelompok.

Sebaliknya, Tanjung Binga dan Tanjung Tinggi menghadapi tantangan kolaborasi, dengan rendahnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, ketimpangan kekuasaan (*power asymmetry*), dan dominasi investor swasta, sehingga membatasi ruang partisipasi masyarakat. Temuan ini mendukung kerangka Pretty (1995) tentang mekanisme partisipasi: Trust, Collaboration Quality, Community Empowerment, CBT Sustainability, di mana kepercayaan menjadi fondasi bagi kolaborasi yang berkualitas, yang selanjutnya mendorong pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas.

Keberhasilan Community-Based Tourism (CBT) sangat bergantung pada kualitas tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan lembaga pendukung (Ishak & Hos, 2025). Desa Batu Itam menampilkan kemitraan kuat dengan UNESCO dan perguruan tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan legitimasi pengelolaan desa wisata. Desa Terong dan Keciput menonjol melalui kolaborasi horizontal berbasis komunitas, membangun jaringan sinergis antara kelompok tani, homestay, pengrajin, dan kelompok konservasi, meskipun tetap memerlukan dukungan formal melalui regulasi desa dan forum komunikasi lintas kelompok. Sebaliknya, Desa Tanjung Binga dan Tanjung Tinggi menghadapi kendala signifikan, termasuk rendahnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, ketimpangan kekuasaan (*power asymmetry*), dan dominasi investor swasta, sehingga membatasi ruang partisipasi masyarakat. Temuan ini selaras dengan kerangka partisipasi Pretty (1995), di mana mekanisme *Trust*, *Collaboration Quality*, *Community Empowerment*, *CBT Sustainability* menjadi fondasi bagi pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

4.5. Strategi Penguatan Model CBT Kolaboratif di Pesisir Belitung

Hasil sintesis lapangan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pesisir berbasis komunitas di Belitung akan lebih efektif jika diletakkan dalam kerangka *collaborative community-based governance*. Strategi penguatan dapat diarahkan pada empat aspek utama:

1. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM lokal. Pelatihan guiding, storytelling, dan hospitality perlu diperluas agar masyarakat dapat naik kelas dari pelaku informal menjadi profesional wisata. Penguatan kapasitas pemuda menjadi prioritas, terutama dalam penguasaan bahasa asing dan pemasaran digital.
2. Penguatan kelembagaan komunitas. Pokdarwis, kelompok konservasi, dan BUMDes perlu diperkuat melalui mekanisme regulatif dan dukungan anggaran agar mampu menjadi motor ekonomi lokal. Kelembagaan yang solid akan memastikan keberlanjutan pengelolaan wisata tanpa ketergantungan tinggi pada aktor eksternal.
3. Kolaborasi lintas-desa dan lintas-sektor. Kolaborasi antardesa (Batu Itam-Keciput-Terong)

memungkinkan pembentukan *cluster tourism* dengan konsep *joint branding* dan paket wisata tematik yang saling melengkapi: maritim-kuliner-konservasi. Kemitraan pemerintah-swasta-komunitas harus didesain dalam prinsip *shared benefits*.

4. Penguatan narasi dan branding destinasi. Masing-masing desa perlu memiliki *storyline* yang khas untuk memperkuat diferensiasi: “Jejak Sriwijaya” (Batu Itam), “Kreativitas Pesisir” (Terong), “Bahari dan Kuliner Tradisional” (Tanjung Binga), “Konservasi Penyu” (Keciput), dan “Ikon Laskar Pelangi” (Tanjung Tinggi). Pendekatan ini selaras dengan prinsip CBT yang menekankan autentisitas dan kebanggaan identitas lokal.

Melalui penerapan strategi tersebut, pariwisata pesisir Belitung berpotensi menjadi model praktik baik (*best practice*) pengembangan destinasi berbasis komunitas dan kolaborasi, yang tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga menguatkan keberlanjutan sosial dan ekologis. Hasil sintesis lapangan menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pesisir berbasis komunitas di Belitung akan lebih efektif jika ditempatkan dalam kerangka *collaborative community-based governance*, dengan memperhatikan kualitas partisipasi masyarakat sebagaimana dirumuskan Pretty (1995). Strategi penguatan diarahkan melalui empat aspek utama yang saling terhubung dalam mekanisme *Trust, Collaboration Quality, Community Empowerment* dan *CBT Sustainability*. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM lokal, melalui pelatihan guiding, storytelling, hospitality, penguasaan bahasa asing, dan pemasaran digital, membangun kepercayaan (*trust*) antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara itu, penguatan kelembagaan komunitas seperti Pokdarwis, kelompok konservasi, dan BUMDes memperkuat kapasitas kolektif dan legitimasi sosial, memastikan masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya lokal, sejalan dengan partisipasi tingkat tinggi menurut Pretty (1995) yaitu *citizen control* dan *partnership*.

Selain itu, kolaborasi lintas-desa dan lintas-sektor memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan kualitas kolaborasi (*collaboration quality*). Contohnya, integrasi Desa Batu Itam, Keciput, dan Terong dalam membentuk cluster pariwisata dengan *joint branding* dan paket tematik (maritim, kuliner, konservasi) serta kemitraan pemerintah-swasta-komunitas berbasis *shared benefits*, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sehingga manfaat ekonomi dan sosial lebih merata. Penguatan narasi dan branding destinasi, seperti “Jejak Sriwijaya” (Batu Itam) dan “Ikon Laskar Pelangi” (Tanjung Tinggi), menumbuhkan rasa kepemilikan dan *pride* lokal yang mendorong partisipasi lebih intensif. Dengan penerapan strategi-strategi ini, mekanisme *Trust, Collaboration, Empowerment* dan *Sustainability* tercapai, menjadikan pengembangan pariwisata pesisir Belitung sebagai *best practice* destinasi berbasis komunitas yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata pesisir berbasis komunitas di Kabupaten Belitung memiliki prospek kuat apabila diterapkan melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendukung. Setiap desa memiliki keunggulan khas: Batu Itam dengan warisan maritim dan situs kapal karam; Terong dengan ekowisata mangrove dan agro-edukasi; Tanjung Binga dengan ekonomi bahari dan kuliner tradisional; Keciput dengan wisata konservasi penyu; serta Tanjung Tinggi sebagai ikon wisata nasional. Tingkat partisipasi masyarakat bervariasi dari pasif hingga *citizen control*, dipengaruhi oleh kapasitas sosial, kelembagaan, dan struktur kepemilikan lahan. Kepercayaan, transparansi, dan kesetaraan antaraktor menjadi faktor kunci keberhasilan CBT di kawasan pesisir.

Penelitian ini memperluas konsep *Community-Based Tourism (CBT)* dengan menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya dan partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kolaboratif. Model *collaborative community-based governance* yang muncul di Belitung menjadi kontribusi konseptual baru, menekankan hubungan mekanistik antara *trust, collaboration quality, community empowerment* dan *CBT sustainability* sebagai determinan keberlanjutan destinasi pesisir.

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Salah satu kontribusi utamanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan di bidang guiding, storytelling, hospitality, pemasaran digital, serta penguasaan bahasa asing. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan komunitas, seperti Pokdarwis, BUMDes, dan kelompok konservasi, sehingga mereka dapat berperan sebagai motor penggerak

ekonomi lokal yang mandiri. Penelitian ini juga mendorong terwujudnya kolaborasi lintas-desa dan lintas-sektor untuk membentuk klaster wisata tematik yang mengedepankan prinsip shared benefits, serta pengembangan branding dan narasi destinasi berbasis identitas lokal guna meningkatkan kebanggaan dan partisipasi masyarakat.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah menetapkan regulasi dan insentif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata pesisir. Dukungan berupa program pelatihan terpadu bagi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku UMKM diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan investasi mikro melalui prinsip shared benefits perlu diperkuat. Pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi forum kolaboratif antar-desa wisata untuk menyusun paket wisata tematik dan strategi promosi bersama, serta mempertimbangkan integrasi konsep *Community-Based Tourism* (CBT), smart tourism, dan konservasi biru (*blue economy*) sebagai strategi pengembangan berkelanjutan di era digital. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, pariwisata pesisir di Kabupaten Belitung memiliki potensi menjadi model praktik baik pengelolaan destinasi berbasis komunitas yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sekaligus memperkuat kesejahteraan serta peran masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, B., Taufik, M., Muharis, M., & Pribadi, I. (2024). Evaluasi kritis atribut pariwisata menggunakan kerangka 13 A: Tinjauan konseptual untuk memajukan pengembangan pariwisata. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 6(2), 119–130. <https://doi.org/10.51977/jiip.v6i2.1848>
- Anggara, B., & Hardyanti, H. (2024). A Critique Of Ecotourism Concepts In Tourism: An Analysis Of Mistakes And Misconceptions. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 7(2), 102–111. Retrieved from <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/wisata/article/view/2436>
- Akapi, N., & Kissya, V. (2023). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Ekosistem Kewirausahaan Pariwisata Bahari Berkelanjutan di Negeri Hukurila, Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 50-64. <https://doi.org/10.30598/populis.18.1.50-64>
- Arisnawawi, M. I. M., Salssa, A., Syam, S. A., Ahmad Zaki, M., Nurhasmiah, S., Marhami, I. A., ... Nafi'ah, I. (2025). *Geliat masyarakat pedesaan pesisir membangun ekonomi biru*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hernandini, D., Maretta, M., & Rosyidie, A. (2017). Kajian kesiapan masyarakat kawasan pantai Tanjung Kelayang sebagai masyarakat wisata bagi pengembangan pariwisata Belitung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 22(2), 86–100.
- Junaid, I. (2020). Peran masyarakat dalam mewujudkan desa wisata: Studi di Kampung Nelayan, Tanjung Binga, Kabupaten Belitung. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 4(2), 60–71. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.47>
- Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). *Buku Pariwisata Berkelanjutan: Konsep, Penerapan, Dan Tantangan*. Penerbit Widina.
- Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.96>
- Rohim, W. K., & Oktawirani, P. (2025, August). Penguatan community-based tourism melalui peran strategis BUMDes dalam pengembangan desa wisata. *e-Sospol*, 12(2), 294–306. <https://doi.org/10.19184/e-sospol.v12i2.53717>
- Liu, C., Liu, G., Yang, Q., Luo, T., He, P., Franzese, P. P., Et Al. (2021). Emergy-Based Evaluation Of World Coastal Ecosystem Services. *Water Research*, 204(19), 117656. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117656>
- Leonard A. Jackson. (2025). Community-based tourism: A catalyst for achieving the United Nations Sustainable Development Goals One and Eight. *Tourism and Hospitality*, 6(1), 29. MDPI. <https://doi.org/10.3390/tourhosp6010029>
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Routledge.
- Mervelito, M. G. P., Rahardjo, P., & Herlambang, S. (2020, November 1). Studi keberhasilan pengelolaan objek wisata Taman Tebing Breksi berbasis community based tourism (CBT) oleh masyarakat Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman. *Stupa*,

- 2(2). <https://doi.org/10.24912/stupa.v2i2.8880>.
- Nasution, A. M., Ulfa, N., & Harahap, N. (2024). Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 208–216. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1943>
- Perdani, A. S., Umar, G., Dewata, I., & Amar, S. . (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Pesisir Indonesia: Tantangan dan Solusi atas Ancaman Lingkungan. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 2(1), 11-22. <https://doi.org/10.71383/f334qg11>
- Pretty, J. (1995). The many interpretations of participation. In *FAO Focus on participatory development* (hlm. 1–23). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Purnomo, E. P., Khairunnisa, T., Prabawa, W. G., Lestari, R., Irawan, I., & Sohsan, I. (2024). *Community for sustainable development: Strategi dan tatakelola baru yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah melalui komunitas*. Tohar Media.
- Singgalen, Y. A., & Prasadja, H. (2025). *Pariwisata Berbasis Komunitas*. Penerbit Widina.
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi . *Indonesian Journal Of International Relations*, 6(1), 114-132. <https://doi.org/10.32787/Ijir.V6i1.335>
- Suryawan, I. B., & Mahagangga, I. O. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Desa Wisata*. Penerbit Adab.
- Tampubolon, N., & Sauyai, L. M. (2024). Pengembangan atraksi wisata berbasis sumber daya kehidupan berkelanjutan masyarakat Kampung Wisata Yenbuba, Raja Ampat. *Ekonomi dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6246>
- Tohidi, M. (2020). Peningkatan peran partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 18(2), 63–72.
- Tohopi, R., Ngabito, F. M., & Mukdin, N. B. (2025). Implementasi community-based tourism sebagai strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 159–171. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94077>
- Utama, N. M., & Haryadi, S. . (2025). Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Sri Bandung Kabupaten Lampung Utara. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 817–826. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.857>
- Utomo, W., Rusfian, E. Z., & Huseini, M. (2024). Collaborative Governance Model Belitung UNESCO Global Geopark. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 3, 735–744. Retrieved from Prosiding Politeknik Negeri Jakarta.



kreatif · inovatif · tangguh · adaptif



TeamWork



Sinergi



Prestasi

Diterbitkan Oleh:

Program studi Perhotelan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Anggota Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI)

Alamat Redaksi

Ruang redaksi Sadar Wisata Program studi DIII Perhotelan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Telp. (0331) 322557 Fax. (0331) 337057 / 322557